



PROPOSAL

Fasilitasi Pembiayaan
Kegiatan Pengembangan Pos
Penyuluhan Desa (Posluhdes) dari
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2020

Dalam Rangka Penumbuhan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi Pos
Penyuluhan Desa (Jarkomluhdes) di 60 Lokasi
Kabupaten Sukabumi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2019

Komplek Perkantoran Cimaja
Jl. Raya Cisolok KM. 10 Cisolok - Palabuhanratu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan usulan fasilitasi pembiayaan kegiatan “Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan” dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Penyuluhan Pedesaan (Jarkomluhdes) pada 60 lokasi di Kabupaten Sukabumi ini dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan didalamnya.

Kami sangat berharap proposal ini dapat berguna walaupun kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam proposal ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan proposal yang akan kami susun di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga proposal yang telah kami susun ini dapat berguna dan memberikan gambaran mengenai kebutuhan dukungan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi. Demikian proposal ini kami susun untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Sukabumi, Maret 2019

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,



IE. H. SUDRAJAT, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19620422 198803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Sasaran	5
1.4. Outcome	5
II. LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Pengembangan Posluhdes	6
2.2. Pengukuran Kinerja Penguatan Kapasitas Posluhdes Penyuluhan Pada 60 Lokasi di Kabupaten Sukabumi	6
III. KEBUTUHAN BIAYA FASILITASI PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES)	
3.1. Kebutuhan Anggaran	8
IV. KESIMPULAN	
4.1. Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar penduduk di republik ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris juga dapat dicirikan melalui komposisi pemanfaatan lahannya (*land utilization*), dimana sebagian besar lahan tersebut dipergunakan untuk pertanian yaitu lebih dari 77,04%. Meskipun lahan pertanian memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya, namun dari segi sumbangannya terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Sektor pertanian justru hanya memberikan sumbangan sebesar 16,92% atau lebih kecil dari sektor industri manufaktur yang mampu memberikan kontribusi sebesar 26,04% (Departemen Pertanian, 2004).

Peran sektor pertanian akan lebih optimal jika didukung dengan sistem penguatan kapasitas yang terdiri dari penyediaan sarana dan bimbingan teknis pengelolaan administrasi ini diimbangi dengan penyediaan anggaran. Ada sebuah doktrin yang hampir usang menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah tergantung pada 3-M (*man, money and management*), yaitu kemampuan manusia mengelola daerah, uang dalam bentuk PAD dan profesionalitas pengelolaan daerah (sistem, manusia, uang, sumberdaya dan lain-lain). Doktrin ini kerap kali diungkapkan oleh para pejabat pemerintah maupun akademisi didikan masa lalu. Agar 3-M berjalan dengan baik, maka pemerintah di kala itu melakukan pembinaan kepada daerah dan desa melalui diklat, santiaji, juklak, juknis, indoktrinasi dan lain-lain. Pemerintah selalu menekankan bahwa setiap Kepala Wilayah termasuk Kepala Desa harus mengetahui segala hal yang berada di wilayah yuridikasinya, sekalipun hanya selembur daun yang jatuh dari pohon. Jika para pejabat bawahan dikumpulkan dan ditanya bagaimana kondisi wilayah, mereka akan menjawab secara standar dan seragam “aman dan terkendali”. Mungkin sebagian besar orang sadar bahwa pembinaan masa lalu itu sangat efektif menciptakan kepatuhan, konservatisme, kemampuan semu, kebodohan, ketergantungan (budaya minta petunjuk dan pengarahan), tumpulnya prakarsa dan tanggung jawab lokal.

Untuk memperkuat posisi sektor pertanian, maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan sebuah keharusan. Fungsi modal dalam

tataran tingkat mikro (usaha tani), tidak hanya salah satu faktor produksi melainkan juga berperan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengadopsi teknologi. Pada era teknologi pertanian yang semakin modern, pengalihan modal yang intensif, alat-alat pertanian maupun sarana produksi mungkin akan menjadi suatu keharusan. Bagi pelaku pertanian, situasi tersebut dapat kembali memunculkan masalah karena sebagian besar tidak sanggup mendanai usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri. Salah satu ciri pertanian rakyat di Indonesia adalah manajemen dan permodalan yang terbatas.

Mungkin pemerintah daerah sadar betul betapa lemahnya kapasitas desa dan karena itu harus ada upaya-upaya konkret untuk menempekan kapasitas desa. Sekarang banyak kabupaten yang masih enggan melakukan pembagian kewenangan dan keuangan kepada desa dengan alasan akan diawali dengan penyiapan kapasitas desa. Tetapi sampai sekarang pemerintah daerah belum membuat kebijakan dan skenario yang memadai tentang apa dan bagaimana meningkatkan kapasitas desa. Yang selalu dilakukan oleh kabupaten adalah memberikan panduan, juklak, juknis serta sosialisasi dan pelatihan singkat untuk membekali perangkat desa menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

Kapasitas desa terutama pemerintah desa bukan sekedar kesanggupan dan kelancaran pemerintah desa menjalankan tugas, pokok dan fungsinya atau mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku. Kapasitas dalam konteks ini adalah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Yang lebih penting lagi kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-misi yang digariskan.

Tentu saja banyak daftar panjang kapasitas yang harus dimiliki oleh desa. Tetapi, paling tidak secara teoritis ada beberapa bentuk kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan.

Pertama, kapasitas regulasi (mengatur) adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat setempat. Pengaturan bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenang-wenangan, perlindungan, pelestarian, pembagian sumberdaya (jabatan desa, kekayaan desa dan pelayanan publik), pengembangan potensi desa, penyelesaian sengketa dan seterusnya. Berbagai macam peraturan desa pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keseimbangan, keadilan, keberlanjutan dan lain-lain.

Kedua, kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Paling tidak ada enam aset yang dimiliki desa; (a) Aset fisik (kantor desa, balai dusun, jalan desa, sarana irigasi dan lain-lain), (b) Aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam dan lain-lain), (c) Aset manusia (penduduk, SDM), (d) Aset sosial (kerukunan warga, lembaga-lembaga sosial, gotong royong, lumbung desa, arisan dan lain-lain), (e) Aset keuangan (tanah kas desa, bantuan dari kabupaten, KUD, BUMDes) dan (f) Aset politik (lembaga-lembaga desa, kepemimpinan, forum warga, BPD, rencana strategis desa, peraturan desa dan lain-lain).

Untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi ini memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Yang jelas tidak semuanya padat modal atau butuh dana besar. Umumnya langkah awal peningkatan kemampuan ekstraksi di mulai dengan analisis potensi desa (termasuk pemetaan tata ruang desa) yang kemudian dirumuskan menjadi rencana strategis desa. Rencana strategis mencakup tentang visi desa, yang kemudian dijabarkan menjadi rangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Seorang Lurah/Kepala Desa yang diberi mandat selama lima tahun memang bukan semata-mata untuk membangun praja tetapi menghadapi tantangan yang berat, yaitu bagaimana dan kemana desa akan dibawa selama lima tahun. Apakah Lurah/Kepala Desa sudah cukup puas karena bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat *nonstop* selama 24 jam atau sudah sangat puas karena peranannya sebagai ujung tombak? Tentu saja tidak.

Termasuk dalam kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pimpinan terutama Kepala Desa melakukan konsolidasi (merapatkan barisan) terhadap

berbagai aktor, baik BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Kalau Lurah Desa dan BPD masih saja ribut, maka tidak akan membawa pemerintahan dan pembangunan secara efektif, apalagi membawa visi misi besar desa. Karena itu berbagai unsur desa itu harus membangun kesepahaman, keterbukaan, kemitraan, kebersamaan, saling mengisi untuk mengawal visi misi desa jangka panjang.

Ketiga, kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam merancang APBDES, terutama dalam hal pengeluaran (alokasi). Umumnya pemerintah desa mempunyai kapasitas distributif yang masih sangat lemah, karena sebagian besar alokasi keuangan desa digunakan untuk belanja rutin perangkat desa, sementara anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan dan ekonomi produktif masih sangat terbatas.

Keempat, kapasitas responsif adalah kemampuan atau kecepatan dalam menanggapi permasalahan seperti aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Kemampuan ini harus ditempa terus, sebab selama ini agenda perencanaan pembangunan desa cenderung berangkat dari kepentingan elite desa.

Kelima, kapasitas jaringan dan kerjasama adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif. Asosiasi Kepala Desa atau forum BPD misalnya, bisa digunakan sebagai wadah untuk membangun kerjasama antar desa. Demikian juga kerjasama dengan perguruan tinggi maupun LSM.

Kelima kapasitas diatas tersebut kalau dijabarkan tampaknya akan diperoleh daftar panjang kemampuan yang harus dikembangkan di level desa. Rangkaian kemampuan itu tentu bersifat sistemik, baik secara individual maupun institusional. Selama ini pengembangan kapasitas desa hanya di monopoli oleh pemerintah supra desa dengan skema pembinaan, tetapi pembinaan ini sebenarnya bukanlah pengembangan kapasitas yang betul-betul dibutuhkan oleh para pengelola desa. Metodologi pembinaan cenderung dari atas dan elitis

sehingga tidak mempunyai kontribusi secara signifikan terhadap penguatan lima kapasitas desa. Sekarang paradigma dan metodologi pembinaan itu harus ditinjau ulang. Jika dulu pembinaan di monopoli oleh pemerintah, maka sekarang ada empat aktor utama yang secara langsung terlibat dalam upaya pengembangan kapasitas desa; (1) Para pemangku kepentingan desa (lurah, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat), (2) Pemerintah supra desa, (3) Perguruan tinggi, (4) LSM.

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara petani, tokoh masyarakat dengan para penyuluh dan instansi terkait.
2. Meningkatkan fungsi dan kinerja posluhdes melalui fasilitasi perangkat Jaringan Komunikasi Penyuluhan Pos Pedesaan (Jarkomluhdes).
3. Meningkatkan motivasi petani untuk mengakses informasi dan teknologi melalui jaringan komunikasi di posluhdes.
4. Meningkatkan kinerja lembaga tani (kelompok tani, gapoktan dan lain-lain) melalui peningkatan peran posluhdes.
5. Mempermudah pengadministrasian (pencatatan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan juga perkembangan kegiatan posluhdes).
6. Mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan pada posluhdes.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) Tahun Anggaran 2020 adalah 60 unit posluhdes yang tersebar di 60 desa di Kabupaten Sukabumi.

1.4. Outcome

1. Meningkatkan kapasitas pengelola posluhdes, khususnya dari aspek kepemimpinan dan kewirausahaan.
2. Teridentifikasinya masalah dan pemecahan masalah dalam menumbuhkembangkan kelembagaan tani di desa melalui pemberdayaan peran posluhdes.
3. Terbangunnya sistem komunikasi yang berkelanjutan antara posluhdes dengan posluhdes lainnya, khususnya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pengembangan Posluhdes

Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok atau masyarakat dalam menentukan kehidupannya. Pengembangan juga merupakan proses upaya perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan.

Sedangkan pengertian posluhdes dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 16 adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Adanya posluhdes dapat sebagai wadah penyuluh PNS, penyuluh swasta dan swadaya serta pelaku usaha di pedesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan di desa atau kelurahan masing-masing.

Sehingga pengertian dari Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) di Kabupaten Sukabumi adalah upaya peningkatan kemampuan kelembagaan posluhdes baik para penyuluh maupun sistem informasi teknologi.

2.2. Pengukuran Kinerja Penguatan Kapasitas Posluhdes Penyuluhan pada 60 Lokasi di Kabupaten Sukabumi

Kinerja adalah prestasi yang dicapai karyawan atau penyuluh dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam organisasi. Agar dapat memberikan umpan balik bagi karyawan maupun organisasi (Handoko, 2001). Sedangkan pengertian tentang prestasi kerja (*job performance*) menurut Lawer dan Porter (As'ad, 2002) ialah *successful role archievement* yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. Prestasi berarti merupakan pencapaian hasil kerja. Pegawai yang kinerjanya tinggi akan produktif dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sangat erat hubungannya dengan produktifitas. Dari produktifitas tersebut dapat dikaitkan dengan keberhasilan pengembangan posluhdes pada 60 lokasi di Kabupaten Sukabumi. Menurut Gomes (2001) bahwa kinerja seseorang dapat diukur dari :

1. *Quantity of work*, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
2. *Quality of work*, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

3. *Job knowledge*, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya.
4. *Creativeness*, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan- tindakan untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang timbul.
5. *Cooperation*, yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota organisasi).
6. *Dependability*, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
7. *Initiative*, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.
8. *Personal qualities*, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan- tamahan dan integritas pribadi.

III. KEBUTUHAN BIAYA FASILITASI PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES)

3.1. Kebutuhan Anggaran

Untuk menunjang penguatan kapasitas posluhdes di 60 lokasi di Kabupaten Sukabumi, untuk proses pencairan tahap pertama didukung biaya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pengembangan posluhdes, sosialisasi posluhdes, rembug tani kelembagaan posluhdes, temu teknis kelembagaan posluhdes, penyediaan kebutuhan administrasi, bimbingan teknis kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pengurus posluhdes, bimbingan teknis penggunaan sistem jarkomluhdes bagi pengelola posluhdes, biaya administrasi dan supervisi posluhdes. Kebutuhan anggaran Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes)

NO.	RINCIAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Sosialisasi pengembangan posluhdes tingkat Kabupaten	2	Kali	18.000.000	36.000.000
2.	Rembug tani kelembagaan posluhdes tingkat Desa	60	Kali	4.000.000	240.000.000
3.	Temu teknis posluhdes tingkat Desa	60	Kali	4.000.000	240.000.000
4.	Pengadaan perangkat pendukung sistem jarkomluhdes	60	Paket	25.700.000	1.542.000.000
5.	Perjalanan dinas supervisi	60	Desa	400.000	24.000.000
6.	Biaya administrasi	1	Paket	18.000.000	18.000.000
JUMLAH					2.100.000.000
<i>Terbilang : Dua Milyar Seratus Juta Rupiah</i>					

Dengan demikian, fasilitas anggaran/biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kegiatan Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) di 60 lokasi yang tersebar di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*).

IV. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan proposal ini bahwa untuk menunjang keberhasilan dalam Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) pada 60 Desa di Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pengembangan posluhdes, sosialisasi posluhdes, rembug tani kelembagaan posluhdes, temu teknis kelembagaan posluhdes, penyediaan kebutuhan administrasi, bimbingan teknis kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pengurus posluhdes, bimbingan teknis penggunaan sistem jarkomluhdes bagi pengelola posluhdes, biaya administrasi dan supervisi posluhdes.

Sukabumi, Maret 2019
Kepala Dinas



Ir. H. SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620422 198803 1 006

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pertanian, 2006. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Jakarta.

Fuad Lukman, 2010. *Analisis Kinerja Penyuluh Berdasarkan Persepsi Kelompok Tani Ternak di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros*. Makassar.

Rencana Kerja Badan BPSDMP dan Evaluasi e-Proposal Tahun 2015.
www.bpsdmp.pertanian.go.id

Haris Faozan. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai Agenda Utama Optimalisasi Pengelolaan Daerah Perbatasan*.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KENDALI SMART PLANNING

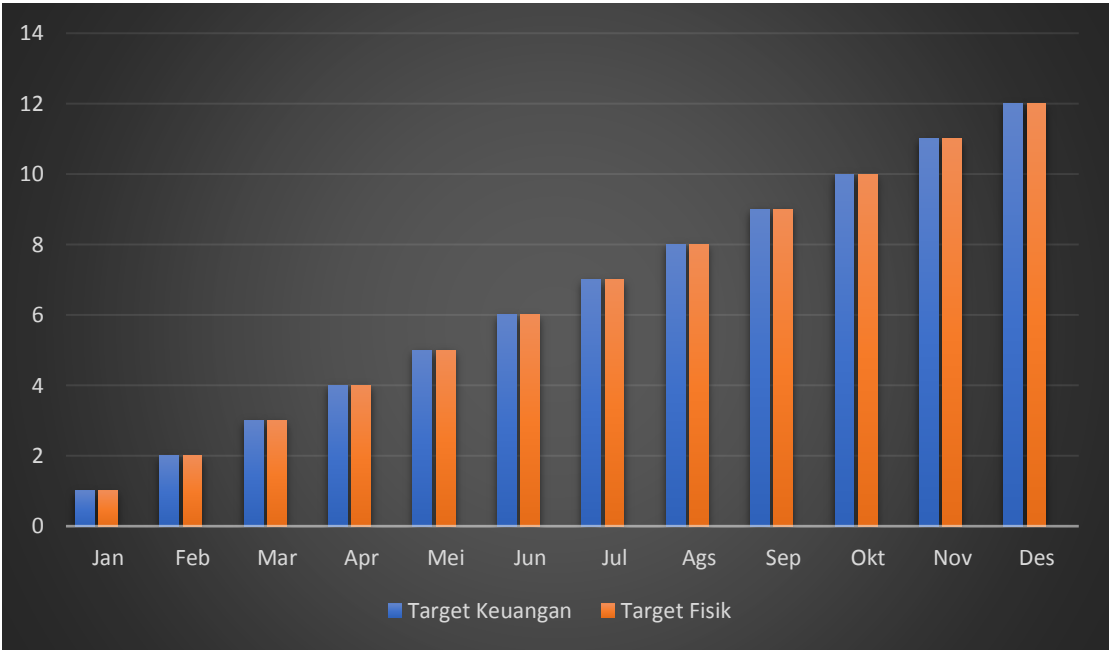
AKTIVITAS	: Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) di 60 Lokasi/Desa (Bantuan Provinsi 2020)
KEGIATAN	: Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) di 60 Lokasi/Desa (Bantuan Provinsi 2020)
PROGRAM	: Peningkatan Kesejahteraan Petani

OPD : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

KRITERIA SMART PLANNING		SUBSTANSI
Specific (S)	<p>Spesifikasi : Kekhususan dari substansi kegiatan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :</p> <p>a. Dasar Hukum</p> <p>b. Kepatutan</p> <p>c. Latar Belakang</p>	<p>a. Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. - Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi 2016-2021. <p>b. Kepatutan (Etika/Budaya/Agama/Fenomena Masyarakat : Patut/Kurang Patut/Tidak Patut) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patut <p>c. Latar Belakang dan Urgensi Usulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. - Meningkatkan kinerja penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan untuk mendukung tercapainya akselerasi peningkatan produktivitas/produksi sektor pertanian serta pendapatan pelaku usaha. - Keterkaitan dengan VISI, MISI, RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RENJA : sangat terkait.

KRITERIA SMART PLANNING		SUBSTANSI
	d. Sifat Kegiatan/Urgensi e. Status Kegiatan f. Jenis Kegiatan g. Lokasi (Level Sub Kegiatan)	d. Sifat Kegiatan/Urgensi : Kritis (Jika kegiatan ini tidak dilakukan) e. Status Kegiatan (Baru/Lanjutan/Pendampingan/Sharing) : - Lanjutan f. Jenis Kegiatan (Fisik/Non Fisik) : - Non Fisik g. Lokasi Sub Kegiatan (Lokasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan) : - Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Jl. Raya Cisolok, KM. 10 Cimaja – Palabuhanratu. h. Distribusi Kegiatan (Cara Pendistribusian Hasil Kegiatan) : - Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes) di 60 lokasi/Desa (Bantuan Provinsi 2020). i. Proses Pelaksanaan (Pengadaan/Jasa Konsultasi/Rapat dan lain-lain) : - Pengadaan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dan pertemuan. j. Bentuk Pelaksanaan : - Swakelola k. Kelompok Sasaran (Masyarakat/Swasta/Aparatur/Pemkab/Kota/Kecamatan/Desa) : - 60 Posluhdes di Kabupaten Sukabumi
Measurable (M)	Ukuran Keberhasilan : Memuat keluaran (<i>output</i>) kegiatan dan sub kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif	- Meningkatnya kinerja Jaringan Komunikasi Posluhdes (Jarkomluhdes) - Meningkatnya kapasitas pengelola Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)
Achievable (A)	Tingkat Ketercapaian Pelaksanaan : Memuat kondisi pelaksana dan lingkungannya saat melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan	1. Sangat sulit 2. Sulit 3. Normal Asumsi : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur

KRITERIA SMART PLANNING		SUBSTANSI																																																																				
Resources (R)	Sumberdaya/Input : Memuat hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan	1. Dana : Rp. 2.100.000.000,- 2. SDM : 292 Orang 3. Prosedur : Juknis 4. Alat-alat dan Bahan 5. SDA 6. Data dan Informasi																																																																				
Time (T)	Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan : Memuat tahapan pelaksanaan sub kegiatan menurut urutan kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th></tr><tr><td>1.</td><td>Persiapan/Perencanaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Pelaksanaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													No.	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	1.	Persiapan/Perencanaan													2.	Pelaksanaan													3.	Pelaporan												
No.	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																																																									
1.	Persiapan/Perencanaan																																																																					
2.	Pelaksanaan																																																																					
3.	Pelaporan																																																																					

KRITERIA SMART PLANNING		SUBSTANSI																																							
Kurva-S	Menggambarkan rencana pencapaian target fisik dan rencana penyerapan keuangan serta rencana pelaksanaan sub kegiatan	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Target Keuangan</th> <th>Target Fisik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>Ags</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>Sep</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>Okt</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr><td>Des</td><td>12</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	Bulan	Target Keuangan	Target Fisik	Jan	1	1	Feb	2	2	Mar	3	3	Apr	4	4	Mei	5	5	Jun	6	6	Jul	7	7	Ags	8	8	Sep	9	9	Okt	10	10	Nov	11	11	Des	12	12
Bulan	Target Keuangan	Target Fisik																																							
Jan	1	1																																							
Feb	2	2																																							
Mar	3	3																																							
Apr	4	4																																							
Mei	5	5																																							
Jun	6	6																																							
Jul	7	7																																							
Ags	8	8																																							
Sep	9	9																																							
Okt	10	10																																							
Nov	11	11																																							
Des	12	12																																							



Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,

IR. M. SUDRAJAT, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620422 1998803 1 006

REKAP KEBUTUHAN PROPOSAL

No.	Rincian	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Sosialisasi pengembangan posluhdes tingkat Kabupaten	2	Kali	18.000.000	36.000.000
2	Rembug tani kelembagaan posluhdes tingkat Desa	60	Kali	4.000.000	240.000.000
3	Temu teknis posluhdes tingkat Desa	60	Kali	4.000.000	240.000.000
4	Pengadaan perangkat pendukung sistem Jarkomluhdes	60	Paket	25.700.000	1.542.000.000
5	Perjalanan dinas super visi	60	Desa	400.000	24.000.000
6	Biaya administrasi/alat tulis kantor	1	Paket	18.000.000	18.000.000
Jumlah					2.100.000.000


 Kepala Dinas Pertanian
 Kabupaten Sukabumi,
Ir. H. SUDRAJAT, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620422 198803 1 006

DATA CP/CL POS PENYULUHAN DESA (BANPROV 2020)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI

No.	Kabupaten	Nama Posluhdes	Alamat		Nama Ketua	Tahun Berdiri
			Kecamatan	Kelurahan/ Desa		
1	Sukabumi	Mandiri Wangi	Palabuhanratu	Bina Wangi	Gandi	2013
2	Sukabumi	Laksana	Palabuhanratu	Citepus	Ujang Sapei	2013
3	Sukabumi	Sejahtera	Palabuhanratu	Cimanggu	Hamdilah	2016
4	Sukabumi	Mulyatani	Palabuhanratu	Pasirsuren	Abdurahman Shaleh	2016
5	Sukabumi	Harapan Maju	Palabuhanratu	Cibodas	Jajat	2016
6	Sukabumi	Cidadap Mandiri	Simpenan	Cidadap	Juhadi Muhamad	2016
7	Sukabumi	Mentari	Simpenan	Loji	Ujang Irawan	2016
8	Sukabumi	Intan Jaya	Simpenan	Kertajaya	Ridwan Nurhuda	2016
9	Sukabumi	Gandaria	Cikakak	Cikakak	H. Dede Mulyadi	2017
10	Sukabumi	Sukamaju Jaya	Cikakak	Sukamaju	Enjang Supendi	2017
11	Sukabumi	Mandiri Sejahtera	Cisolok	Pasirbaru	Asep Haqi Alhaq	2017
12	Sukabumi	Bina Mandiri	Cisolok	Cikahuripan	Wahyudi Irawan	2017
13	Sukabumi	Cahaya Tani	Cisolok	Cikelat	Iwan	2017
14	Sukabumi	Cikelat Mandiri	Cisolok	Karangpapak	Sapurdin	2017
15	Sukabumi	Citra Alam	Nagrak	Nagrak Utara	Udin Syamsudin	2009
16	Sukabumi	Sukatani	Nagrak	Pawenang	Ujang Munawar	2009
17	Sukabumi	Sari Bumi	Nagrak	Kalaparea	Uten S.	2015
18	Sukabumi	Minamukti Terpadu	Nagrak	Cihanjavar	Ujang Sukria	2015
19	Sukabumi	Sinar Jaya	Nagrak	Girijaya	Rahmat	2017
20	Sukabumi	Tulaten Maju	Cibadak	Tenjojaya	Baban	2006
21	Sukabumi	Sukatani	Cisaat	Sukamantri	Jajat Sudrajat	2010
22	Sukabumi	Bunga Mekar	Cisaat	Nagrak	H. Mustopa	2007
23	Sukabumi	Sukadamai	Cisaat	Babakan	Ade Supiandi	2008
24	Sukabumi	Wanasari	Sukabumi	Perbawati	Nana Sumarna	2012
25	Sukabumi	Anugrah Jaya	Sukabumi	Sudajaya Girang	Dede	2017
26	Sukabumi	Rahayu Hurip	Sukabumi	Parungseah	Dadan Ramdani	2016
27	Sukabumi	Mandiri Jaya	Sukabumi	Sukajaya	Badrudin	2017
28	Sukabumi	Karya Bumi Mandiri	Cireunghas	Cireunghas	H. Ece Kamaludin	2010
29	Sukabumi	Sumber Tani Mukti	Cireunghas	Cibeureum	M. Dumyati	2010
30	Sukabumi	Gadna Parawangi	Cireunghas	Cipurut	Hasan Basri	2010
31	Sukabumi	Sari Tani	Sukalarang	Sukamaju	H. Onin	2010
32	Sukabumi	Titisan Jaya	Sukalarang	Titisan	H. Rahmat	2010
33	Sukabumi	Karya Usaha	Sukalarang	Semplak	Jajang Mustopa	2007
34	Sukabumi	Silih Asih	Gegerbitung	Gegerbitung	Cece	2008
35	Sukabumi	Mekar Jaya	Gegerbitung	Cijurey	Iwan	2009
36	Sukabumi	Barokah	Gegerbitung	Karangjaya	Toto	2011
37	Sukabumi	Tani Mukti	Gegerbitung	Caringin	Wahyudin	2009

38	Sukabumi	Talaga Herang	Gegerbitung	Sukamanah	Asep Toni	2015
39	Sukabumi	Tani Makmur	Gegerbitung	Ciengang	Dayat	2015
40	Sukabumi	Buniwangi	Gegerbitung	Buniwangi	Mamat R. F15	2015
41	Sukabumi	Karya Mandiri	Cikembar	Sukamaju	Enjang	2015
42	Sukabumi	Sekar Mulya	Cikembar	Sukamulya	Sukarta	2015
43	Sukabumi	Tinunggal	Cikembar	Cikembar	Revi Y.	2013
44	Sukabumi	Karyatani	Cikembar	Bojong	Ima S.	2015
45	Sukabumi	Mekarjaya	Cikembar	Bojongkembar	H. Apud M.	2015
46	Sukabumi	Sugih Mandiri	Cikembar	Cibatu	Sumanto	2015
47	Sukabumi	Raharja	Cikembar	Kertaraharja	Madta'i	2015
48	Sukabumi	Makmur Jaya	Cikembar	Parakanlima	Saepudin	2015
49	Sukabumi	Sugih Mandiri	Cikembar	Cimanggu	Ruchiat	2015
50	Sukabumi	Makmur Jaya	Gunungguruh	Kebonmanggu	Uding	2012
51	Sukabumi	Mekar Tani	Gunungguruh	Sirna Resmi	Emat Suyatman	2014
52	Sukabumi	Subur	Cicantayan	Cijalingan	Nana	2011
53	Sukabumi	Mandiri 1	Cicantayan	Cicantayan	Obih S.	2012
54	Sukabumi	Putra Motekar	Cikidang	Bumisari	Nanang M.	2011
55	Sukabumi	Selaras	Cikidang	Cicareuh	Tia Setia N.	2011
56	Sukabumi	Kulawargana	Cikidang	Cikidang	Robi Sunandar	2013
57	Sukabumi	Waluya	Ciambar	Wangunjaya	Unyam Jamjuri	2009
58	Sukabumi	Mekar Tani	Ciambar	Ginangjar	Solehudin	2009
59	Sukabumi	Sami Peryogi Tani	Kadudampit	Sukamanis	Cece	2012
60	Sukabumi	Giri Tani	Kadudampit	Gedepangrango	Soma	2012


 Kepala Dinas Pertanian
 Kabupaten Sukabumi,
I. H. SUDRAJAT, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620422 198803 1 006